



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 – Telp. (021) 3500450 Jakarta 10110
Fax (021) 3500450, www.kemendagri.go.id

Jakarta, 19 JULI 2021

Nomor : 005/4525/POLJUM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Undangan Peserta

Yth. (Daftar Terlampir)

Di
Tempat

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN dan PN) pada pemerintah daerah sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020 - 2024, bersama ini Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi RAN P4GN dan PN secara *virtual*, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Juli 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai (Jadwal terlampir)
Fasilitas : Via Zoom Meeting (ID dan Password) akan diberitahukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
Agenda : Arah Kebijakan dan Optimalisasi RAN P4GN dan PN pada Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon partisipasi Bapak/Ibu/saudara(i) untuk dapat hadir dan memberikan masukan pada rapat dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Ketahanan Sosial Kemasyarakatan, Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri melalui telpon/fax (021) 3500450 atau Sdri. Arinda Yuni Syantika Hp. 08128102105. dan Sdri. Andi Purnamawaty Muchtar Hp. 087878748804.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIR. 19730116 199302 1 002

Tembusan :
Yth. Menteri Dalam Negeri

**RAKORNAS OPTIMALISASI IMPLEMENTASI RAN P4GN DAN PN
PADA PEMERINTAH DAERAH**

I. DAFTAR UNDANGAN PESERTA PEMERINTAH DAERAH

1. Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
7. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Narkotika Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;

II. DAFTAR UNDANGAN PESERTA PUSAT

A. Kementerian/Lembaga

1. Deputi Pencegahan, BNN RI;
2. Deputi Pemberdayaan Masyarakat, BNN RI;
3. Deputi Rehabilitasi, BNN RI;
4. Deputi Pemberantasan BNN, RI;
5. Deputi Hukum dan Kerjasama, BNN RI;
6. Kepala Biro Perencanaan, BNN RI;
7. Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas;
8. Direktur Politik dan Komunikasi, Bappenas;

B. Komponen Kementerian Dalam Negeri

1. Kepala Biro Perencanaan, Setjen;
2. Kapus Penerangan, Setjen;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
5. Sesditjen Bina Pembangunan Daerah;
6. Sesditjen Bina Keuangan Daerah;
7. Sesditjen Bina Pemerintahan Desa;
8. Sesditjen Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Sesditjen Otonomi Daerah;
10. Sesditjen Bina Administrasi Wilayah;
11. Para Direktur lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
12. Para Pejabat Administrator dan Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Polpum;
13. Kabag Perencanaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
14. Para Analis Ahli Muda dan JFU Ditjen Polpum;
15. Kasubbag TU dan staf Ditjen Polpum.